

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media:	Radar Sampit	Halaman: 9
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	<input checked="" type="checkbox"/>	Tabengan

# APBD Harus

# Transparan!

## PALANGKA RAYA, PPOST

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menegaskan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus taat pada peraturan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan berkeadilan atas kepentingan rakyat.

Untuk itu, Sugianto Sabran mengharapkan, adanya kerja sama yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif, sehingga pelaksanaan APBD tahun-tahun mendatang terus berjalan baik.

"Kami mengharapkan kepada semua pihak, terutama DPRD, agar tetap melakukan pengawasan supaya dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya, kemarin, di Palangka Raya.

Menurut Sugianto Sabran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan kali berturut-turut. Opini itu sebagai bukti upaya pemerintah provinsi melalui pelaksanaan APBD sudah sangat bagus.

"Opini WTP yang berhasil kita raih berkat dukungan dan kerjasama dengan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah. Kita berharap agar sinergi ini tetap berjalan baik," jelasnya.

Sugianto Sabran menyampaikan, penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas

kerjasama dan rekomendasi DPRD yang telah membantu melaksanakan pembahasan atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pada rapat paripurna.

"Rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh DPRD akan menjadi perhatian dan acuan guna meningkatkan dan memantapkan program pelaksanaan APBD dimasa yang akan datang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, M Ali Asyhar mengatakan, tindak lanjut penyelesaian per semester II tahun 2023 sebesar 76,02 persen. Pemeriksaan laporan ini akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya diharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menyusun perencanaan keuangan yang dikonsolidasikan ke BKAD.

"Selama dua gelombang, yang sekarang pemeriksaan interim, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun selanjutnya. Ini yang menjadi ukuran kami menentukan batas materilialitas yang termasuk batas penilaian opini," tandasnya. (ans/P3)